PROGRAM LEGISLASI DPRD KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN TAHUN 2024		RAN REALISASI 2024		SISA ANGGARAN		PENCAPAIAN KEGIATAN (%)	КЕТ.	
	Rp	2.593.915.500	Rp	2.569.390.286	Rp	24.525.214	99,05%		
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp	2.593.915.500	Rp	2.569.390.286	Rp	24.525.214	99,05%	Selesai	
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp	515.185.500	Rp	513.356.925	Rp	1.828.575	99,65%	Selesai	
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp	1.256.338.000	Rp	1.248.730.003	Rp	7.607.997	99,39%	Selesai	
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Rp	304.482.000	Rp	294.066.194	Rp	10.415.806	96,58%	Selesai	
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Rp	150.000.000	Rp	145.483.000	Rp	4.517.000	96,99%	Selesai	
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Rp	367.910.000	Rp	367.754.164	Rp	155.836	99,96%	Selesai	

Bengkayang, 1 Agustus 2025

Mengetahui,

APRO Kabupaten Bengkayang,

POK KUS. AP., M. Si

na Utama Muda / IV-c

19741011 199412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

JALAN GUNA BARU RANGKANG KOMPLEK PEMDA BENGKAYANG TELP.(0562).441551 BENGKAYANG.

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 semester II ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 semester I disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Sekretariat DPRD dalam kurun waktu Tahun 2024 semester I. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 semester I disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD serta Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026. Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretrariat DPRD ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat DPRD pada Tahun 2024 semester II, berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka



pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai alat umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Dengan segala kerendahan hati dan juga harapan, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang serta dapat memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya "*clean government dan good governance*".

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bengkayang serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang.k

Bengkayang, Januari 2025

SEKRETARIS DPRD

BUPATEN BENGKAYANG,

Pembina Utama Muda/ IV.c NIP. 19710416 200003 2 005

Halaman: ii



Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang **Tahun 2024 semester II** merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjwaban kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan dan mandat yang diterima. Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggung jawab tertentu berdasarkan pendelegasian kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas itu. Pada akhirnya kewenangan dan mandat yang didelegasikan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberikan kewenangan dan mandat tersebut.

Disamping itu, masyarakat umum juga menghendaki agar pemerintah menyelenggarakan sistem akuntabilatas kinerja instansi yang baik, tertib dan teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Setiap instansi akan selalu berusaha untuk melakukan perbaikan sehingga terselenggara praktek-praktek yang sehat, ekonomis, efisien, produktif, demokratis, adil, bertanggungjawab, transparan dan tanggap terhadap perubahan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD dan menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bengkayang yang diserahkan oleh Bupati.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati, Sekretariat DPRD menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mencerminkan capaian kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) dan menginformasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis yang merupakan komitmen bersama.



Penyusunan LAKIP diharapkan sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan aparatur pemerintah (*dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang*) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta dapat meningkatkan dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Dalam Tahun Anggaran 2024 semester I, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang melaksanakan 2 (dua) Program Pembangunan yang meliputi 84 (Delapan puluh empat) kegiatan. Untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategi dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut telah ditetapkan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan diatas, yang dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 Perubahan sebesar Rp. 34.163.802.010,- (Tiga puluh empat milyar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua ribu sepuluh rupiah). Dari anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 33.523.514.714 (Tiga puluh tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah) atau 98.13%.

Sasaran yang menjadi perhatian utama adalah sasaran yang berkaitan dengan upaya meningkatnya efektifitas Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan administratif kepada DPRD, serta sasaran lain yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kapasitas DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Capaian sasaran Tahun 2024 berdasarkan indikator yang ditetapkan, sebagian besar telah terpenuhi sesuai target yang ditetapkan, namun demikian harus lebih meningkatkan koordinasi dalam terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja sehingga dapat memenuhi terkumpulnya data yang



memadai dan akurat. Dari 2 (dua) sasaran yang ditetapkan, keduanya dikategorikan Berhasil yakni 64.36% dan 33.76%.

Sasaran yang termasuk dalam kategori Berhasil adalah:

- 1. Ratio kecukupan pemenuhan kebutuhan jasa kantor.
- 2. Tingkat kelancaran pelayanan surat menyurat.
- 3. Tingkat efisiensi penggunaan jasa kantor.
- 4. Ratio kecukupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasara kerja.
- 5. Tingkat tertib penggunaan sarana dan prasara kerja.
- 6. Tingkat disiplin aparatur.
- 7. Tingkat sumber daya aparatur.
- 8. Tingkat akuntabilitas kinerja dan keuangan.
- 9. Tingkat kelancaran pembahasan rancangan peaturan daerah.
- 10. Efektifitas hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama.
- 11. Tingkat diperolehnya keputusan dalam rapat-rapat alat kelengkapan DPRD.
- 12. Tingkat kelancaran rapat paripurna.
- 13. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan anggota DPRD.

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran tersebut dipengaruhi oleh adanya upaya kerja keras Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen anggota DPRD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang serta tidak terlepas dari dukungan dan peran serta seluruh pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD yang secara sinergis saling membantu serta adanya komitmen dan dorongan dari Pimpinan untuk senantiasa memberikan motivasi kepada pegawai dan seluruh komponen yang terkait dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan bersama.

Namun demikian, capaian tersebut diatas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan maupun dalam pelayanan, yang



disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi. Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuipaten Bengkayang akan menempuh kebijakan pokok dan kebijakan strategis serta kebijakan operasional pembangunan yang diharapkan akan mewujudkan cita-cita luhur yaitu " *Menjadi Fasilitator yang berkualitas dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD"*.

Daftar Isi

KATA P	ENG	GANTAR	i
RINGKA	ASAN	N EKSEKUTIF	iii
DAFTAF	R ISI		vii
BAB I		: PENDAHULUAN	1
	A.	Gambaran Umum	1
		1. Pendahuluan	1
		2. Struktur Organisasi	2
		3. Tugas Pokok dan Fungsi	4
		4. Sumber Daya Aparatur	11
		5. Sumber Daya Keuangan	14
		6. Sarana dan Prasarana	15
	B.	Permasalahan Utama (Strategic Issues)	16
BAB II		: PERENCANAAN KINERJA	18
	A.	RENCANA STRATEGIS	18
		1. Visi	19
		2. Misi	20
		3. Tujuan dan Sasaran Beserta Indikator	22
	В.	Perjanjian Kinerja	25
BAB III		: AKUNTABILITAS KINERJA	26
	A.	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	26
	В.	REALISASI ANGGARAN	35
BAB IV		· PENUTUP	42

PENDAHULUAN

BAB

1

Halaman: viii



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBAR UMUM

a. Pendahuluan

Penilaian dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk itu, Pelaksanaan Ekonomi Daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Proses penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dilakukan setiap semester dan akhir tahun anggaran untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran stategis instansi.



b. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, yakni pada Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten/kota;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten/kota;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota; dan
- d. Penyediaan dan Pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota.

Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang secara teknis operasional dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dengan susunan organisasinya terdiri dari Sekretaris DPRD, 3 (tiga) Bagian, 2 (dua) Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

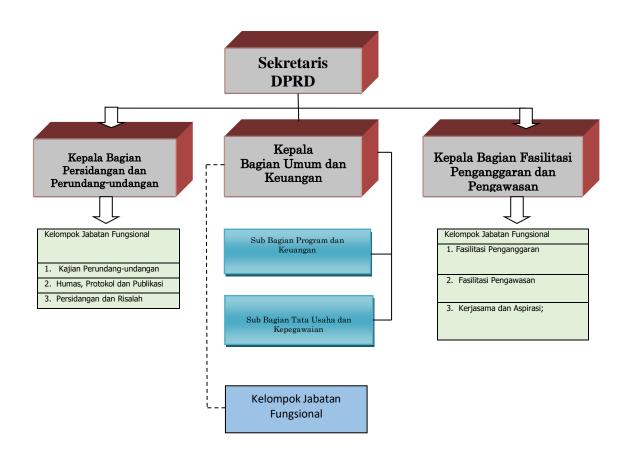
Susunan Organisasi DPRD Kabupaten Bengkayang tersebut meliputi :

- 1. Sekretaris DPRD
- 2. Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
- 3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
- 4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dapat dilihat sebagai berikut :



BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKAYANG SESUAI PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2022





c. Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagai berikut:

Tugas Pokok

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Sekretaris

Sekretaris yang memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas pokok yaitu sebagai penyelenggaraan koordinasi dan mengendalikan kegiatnn Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam memberikan dukungan admiriistratif kepada Pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- a. Penyusunan perencanaan dan program kerja di lingkup Sekretariat
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Penyelenggaraan administrasi
 keuangan Sekretariat DPRD;
- b. Penyusunan rencana anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dalam rangka menunjang tugas dan fungsi DPRD;



- b. Penelaahan dan pengkoordinasian perumusan konsep kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- c. Pengendalian pelaksanaan persidangan dan rapat yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian kegiatan penerangan,
 publikasi dan pemberitaan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah serta urusan keprotokolan;
- e. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, perjalananan dinas dan ketatausahaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Adapun tugas pokok dan Fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

- Tugas Pokok:

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

- Fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - d. Penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



1.1. Bagian Umum dan Keuangan

Tugas Pokok:

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD.

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- d. Fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. Penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
- g. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. Penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- j. Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. Evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- I. Verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- m. Verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- n. Penyelenggaraan Penatausahaan Keuangan Sekretariat DPRD;
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. Koordinasi perigelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. Verifikasi pertanggungjawaban ketiangan Sekretariat DPRD;
- r. Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD;
- s. Koordinasi dan Evaluasi Laporan Keuangan Sekretariat DPRD;
- t. Evaluasi Pengadministrasian dan Akuntansi Keuangan Sekretariat DPRD;
- u. Penyusunan Laporan Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD; dan
- v. Pelaksanaan Fungsi Kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan



Bagian Umum dan Keuangan membawahi tiga Sub Bagian yaitu :

1.1.1 Subbagian Program dan Keuangan

Tugas Pokok:

melaksanakan administrasi kesekretariatan terkait penyusunan program dan keuangan.

- a. Penyusunan bahan perencanaan;
- b. Penyusunan RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
- c. Penyusunan perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- d. Perencanaan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- e. Perencanaan pemverifikasian keuangan;
- f. Verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- g. Koordinasi kepada PPTK, Bendahara dan Pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/ GU/TU/LS;
- h. Verifikasi Perencanaan Kebutuhan Rumah Tangga;
- Verifikasi Kebutuhan Perlengkapan Sekretariat DPRD;
 Perencanaan Penatausahaan Keuangan;
- k. Penyusunan pengadministrasian dan Pembukuan Keuangan;
- Koordinasi kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan
 Belanja dan Pertanggungjawaban Keuangan;
- m. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- n. Analisis Laporan Keuangan;
- O. Analisis Laporan Kinerja;
- p. Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan; dan
- q. Pelaksanaan Fungsi Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.



1.1.2. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Tugas Pokok:

Melaksanakan Administrasi Kesekretariatan terkait Tata Usaha dan kepegawaian.

Fungsi:

- Pelaksanaan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
- b. Pelaksanaan kearsipan;
- c. Penyusunan administrasi kepegawaian;
- d. Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian;
- e. Penyiapan bahan Administrasi Kepegawaian;
- f. Analisis Kebutuhan dan merencanakan Penyediaan Tenaga Ahli;
- g. Penyiapan Bahan Administrasi Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan dan Formasi Pegawai; dan
- h. Pelaksanaan Fungsi Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

1.2. Bagian Persidangan dan Perundang – Undangan

Tugas Pokok:

Mendukung Penyelenggaraan Legislasi.

- a. Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan;
- b. Fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah inisiatif;
- d. Verifikasi, Evaluasi dan Analisis Produk Penyusunan Peraturan Perundangan;
- e. Pengumpulan Bahan penyiapan draf Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif;
- f. Fasilitasi penyelengaraan persidangan;
- g. Penyusunan risalah rapat;
- h. Koordinasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;



- i. Verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);
- j. Verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
- k. Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- I. Penyelenggaraan publikasi;
- m. Penyelenggaraan keprotokolan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan

1.3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Tugas Pokok:

Mendukung penyelenggaraan bidang Penganggaran dan Pengawasan.

- Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi Pembahasan APBD/ APBDP;
- c. Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan Raperda pertangungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan Laporan Semester pertama dan Prognosis enam bulan berikutnya;
- e. Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung|awaban Kepala Daerah;
- f. Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI;
- g. Fasilitasi, verifikasi, dan Koordinasi Aspirasi Masyarakat
- h. Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi Rumusan Rapat dalam rangka Pengawasan;
- Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi Pelaksanaan Penegakan Kode Etik DPRD;
- j. Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi dukungan Pengawasan Penggunaan Anggaran;
- k. Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan;
- I. Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD:



- m. Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah;
- n. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

1.4. Jabatan Fungsional Tertentu

Kelompok Jabatan fungsional diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.

Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementeriari terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang merriiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikari pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Sumber Daya Aparatur

Dukungan Sumber Daya Aparatur pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dirasakan relatif kurang, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai.



Jumlah Pegawai saat ini sebanyak 54 (lima puluh empat) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer, yang dapat dilihat sebagai berikut :

Keadaan Pegawai Sekretariat DPRD
Kabupaten Bengkayang

	ιασαραιο	ili beligkayai	<u>'9</u>
No	Uraian	Jumlah (orang)	Keterangan
1	PNS	30	
2.	Tenaga Honorer :		
	a. Staf/tenaga administrasi	-	
	b. Satpam	6	Pada Kantor DPRD dan
	c. Staf/Tenaga Kebersihan	16	Rumah Dinas Ketua DPRD
	Jumlah	52	

b. Komposisi Pegawai berdasarkan golongan/ruang dan tingkat pendidikan

Keadaaan Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dilihat dari golongan / ruang dan tingkat pendidikannya dapat dilihat dibawah ini :

Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

			Tingkat Pendidikan							
No	Golongan	SD	SLTP	SLTA	Sarjana Muda/Diploma	S-1	S-2	Jumlah		
1	Gol I	-	-	-	-	-	-	-		
2	Gol II	-	-	8	2	-	-	10		



3	Gol III	-	-	4	3	7		16
4	Gol IV	-	-	-	-	2	4	6
	Jumlah	-	-	12	5	9	4	28

c. Komposisi Pegawai berdasarkan unit/sub unit kerja

Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang berdasarkan Unit/Sub Unit kerja adalah sebagaimana ditampilkan sebagai berikut :

Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Unit/Sub Unit Kerja

No	Unit/Sub Unit Kerja	PNS	Honor	Jumlah	Keterangan
1.	Bagian Umum dan Keuangan	1	-	1	
	a. Sub Bagian Program dan Keuangan	4	2	6	
	b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	4	1	4	
	c. Sub Bagian Rumah Tangga	2	1	3	
2	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	1	-	1	
	a. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan	1	2	3	
	b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah	4	ı	4	
	c. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi	2	2	4	
3	Bagian Fasilitasi dan Pengawasan	1	-	1	
	a. Sub Bagian Fasilitasi dan Penganggaran	2	1	3	



b. Sub Bagian Fasilita dan Pengawasan	si 2	-	2	
c. Sub Bagian Kerjasam dan Aspirasi	a 1	1	2	

Data tersebut diatas tidak termasuk Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dan Tenaga Honorer (Satpam) dan kebersihan kebun.

a. Komposisi Pegawai dilihat dari golongan dan kedudukannya

Komposisi Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dilihat dari golongan dan kedudukannya adalah sebagai berikut:

Komposisi Pegawai dilihat dari Golongan dan Kedudukannya Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang

		Kedudukan								
No	Golongan	Eselon	Eselon	Eselon IV	Eselon V	Staf	Fungsional khusus	Fungsional Umum	Jumlah	
1	Gol IV	1	3	-	-	-	2	-	6	
2	Gol III	-	-	4	-	6	4	-	14	
3	Gol II	-	-	-	-	10	-	-	10	
4	Gol I	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	1	3	4	-	16	6	-	28	

Sumber data: BKD Kabupaten Bengkayang

e. Sumber Daya Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Sekretariat DPRD kabupaten Bengkayang selama tahun 2024 semester 2 dapat dirinci sebagai berikut :



CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	IN	DIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya mutu, eterampilan pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur dan peralatan	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
	kerja serta penyediaan sarana dan prasarana kerja Sekretariat DPRD secara baik dan berkelanjutan	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100 %
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Laporan / Kegiatan	3 Laporan / Kegiatan	100 %
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9 unit	9 unit	100%
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	27 Laporan	27 Laporan	100 %
		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36 unit	36 unit	100 %
		9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	24 Dokumen	24 Dokumen	100 %
		10	Layanan Administrasi DPRD	50 Laporan	50 Laporan	100 %
2	Meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam pelaksanaan tugas fungsi dan pokok DPRD :	1	Pembentukkan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	105 Dokumen	105 Dokumen	100 %
	Pengawasan, Legislasi dan Penganggaran serta memaksimalkan	2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	12 dokumen	12 dokumen	100 %



penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat Kabupaten Bengkayang	3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	97 dokumen	97 Laporan	100 %
3 3,4 3	4	Peningkatan Kapasitas DPRD	75 Dokumen	75 Dokumen	100 %
	5	Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat	21 Dokumen	21 Dokumen	100%
	6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	24 dokumen	24 Laporan	100%
	7	Pembahasan Kerjasama Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	100%
	8	Fasilitas Tugas DPRD	45 Dokumen	45 Dokumen	100%

f. Sarana dan Prasarana

Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang memiliki gedung dengan 1 (satu) lantai. Lantai 1 (satu) terbagi menjadi 2 bagian yaitu ruang kerja Sekretariat dan ruang kerja DPRD. Ruang kerja sekretariat terdiri dari 10 ruang kerja bagi Pejabat dan staf Sekretariat DPRD dan merupakan area penyediaan makanan dan minuman serta tempat penyimpanan sarana perlatan dan perlengkapan kantor. Ruang kerja DPRD terdiri dari 3 (tiga) ruang komisi, 1 (satu) ruang Badan Kehormatan, 5 (lima) ruang kerja fraksi, 1 (satu) ruang Muspida, 1 (satu) ruang rapat Paripurna, 3 (tiga) ruang kerja Pimpinan DPRD, 1 (satu) ruang Tata Usaha Pimpinan DPRD, dan 1 (satu) ruang transit untuk rapat.

Sarana dan prasarana penunjang kelancaran tugas bagi Sekretariat DPRD berupa komputer Pc sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit, laptop 10 (sepuluh) unit, infokus sebanyak 2 (dua) unit, printer sebanyak 30 (tiga puluh) unit, kamera tele sebanyak 1 (satu) unit, wifi, meja kerja, kursi kerja, meja rapat, kursi rapat, meja dan kursi tamu, sound system, lemari arsip, filling cabinet dan genset 1 (satu) unit, kendaraan dinas roda dua sebanyak 13 (tiga belas) unit, kendaraan dinas roda empat sebanyak 7 (tujuh) unit.



Ketersediaan sarana prasarana tersebut dirasa cukup memadai sebagai penunjang kelancaran tugas dan fungsi anggota DPRD dan Sekretariat DPRD. Hanya ada beberapa item peralatan yang dianggap belum mencukupi atau kurang jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan kelancaran pelayanan penunjang tugas dan fungsi kedewanan.

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- Adanya perubahan system penginputan sehingga memperlambat Laporan keuangan. Misalnya Migrasi SIPD ke Simakda.
- 2. Lemahnya Sistem SIPD-RI sehingga terjadi lambatnya penginputan anggaran. Dalam implementasinya masih banyak bug dan error.
- 3. Kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas yang mampu melaksanakan tugas-tugas dalam kesekretariatan.

BAB 2



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Ssekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan SKPD serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Rencana Strategi (Renstra) juga merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat, dampak bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Bengkayang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Bengkayang dan stakeholder lainnya yang ada di Kabupaten Bengkayang.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.



Guna merealisasikan dan mewujudkan Visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal kemudian misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategi organisasi dalam memenuhi visi misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategi, dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan, dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya.

1. VISI

Adapun Visi dan Misi sekretariat DPRD adalah Ssebagai berikut:

VISI SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang mendukung dan melaksanakan Visi RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 yakni "KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA".

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ke depan sebagai unsur staf yang memberikan palayanan administratif kepada DPRD perlu adanya rumusan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepada DPRD yaitu dengan arah dan dan tujuan yang positif dengan Rencana Strategi yang diwujudkan dalam Visi Sekretariat DPRD.



Pernyataan Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.

Berdasarkan pengertian di atas maka rumusan visi dalam Renja adalah dalam rangka mendukung visi Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang yang merupakan target yang ingin dicapai dimasa yang akan datang yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang agar konsisten, eksis dan antisipatif, inovatif serta produktif.

Memperhatikan pengertian tersebut di atas, kondisi potensi daerah serta kebijakan nasional, maka Visi Pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang yang telah dituangkan dalam Renstra SKPD adalah:

"Menjadi Fasilitator Yang Berkualitas dalam menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD".

2. MISI SEKRETARIAT DPRD

Untuk mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang melaksanakan Visi ke-2 yakni : "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha"

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf pada Sekretariat DPRD yang memberikan palayanan administratif kepada DPRD perlu adanya rumusan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepada DPRD yaitu dengan arah dan dan tujuan yang positif dengan Rencana Strategisnya yang diwujudkan dalam Visi Sekretariat DPRD.



Dalam melaksanakan Visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan Misi Sekretariat DPRD sebagi berikut :

- a. Mewujudkan pelayanan yang prima dalam menunjang pelaksnaan tugas dan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dari DPRD.
- b. Mewujudkan sinergi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pernyataan Misi

Misi merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapian suatu visi, yang selanjutnya dijadikan sebagai suatu pedoman dalam penyusunan tujuan, sasaran dan strategi dalam mengalokasikan sumber daya daerah, harus diemban atau dilaksanakan oleh institusi pemerintah. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki institusi pemerintah dari peraturan perundang-undangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih, memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan/ penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Dalam perumusan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang memperhatikan tugas pokok dan fungsi instansi, keinginan dan harapan pelanggan dan *stakeholders*, serta permasalahan yang akan dihadapi/ditangani sehubungan dengan perubahan lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun internal, sehingga misi yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang harus mampu:

- 1) Mencakup semua pesan yang terdapat dalam visi.
- 2) Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai.
- 3) Memberikan petunjuk kelompok sasaran yang mana yang dilayani.



2. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yakni :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada DPRD guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara berdayaguna dan berhasilguna.
- b. Meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dalam memfasilitasi peningkatan Kapasitas DPRD.

Serta dua sasaran untuk mewujudkan pelakssanaan Visi dan Misi Sekretariat DPRD antara lain :

- a. Meningkatnya efektifitas Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan administratif kepada DPRD.
- b. Meningkatnya kapasitas DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

TUJUAN

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Tujuan diperlakukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Untuk menetapkan tujuan, diperlukan suatu alat bantu berupa metode atau analisis yang dapat memberikan suatu rujukan teoritis dalam menggambarkan situasi dan kondisi Kabupaten Bengkayang. Salah satu metode atau analisis yang dianggap valid dan realiabel memberikan bantuan untuk memahami situasi dan kondisi Kabupaten Bengkayang adalah metode atau analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threathts (SWOT)*, yang akan mencermati lingkungan ekstern



Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang. Dari pencermatan lingkungan intern dan ekstern ini akan diperoleh strategi yang akan menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan guna memberikan rambu-rambu dalam menetapkan tujuan.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan *benefit* atau *impacts* dari suatu kegiatan. Untuk keperluan ini dibutuhkan adanya sistem pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang.

Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan harus memperhatikan:

- 1. Cukup jelas.
- 2. Diselaraskan dengan visi dan misi instansi.
- 3. Mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi.
- 4. Mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan (critical success faktor).
- 5. Menggambarkan hasil yang ingin dicapai.
- 6. Mengakomodasi issue strategis yang dihadapi.
- 7. Mencerminkan "Core Area" dimana organisasi berperan.

SASARAN

Tujuan berdimensi waktu jangka panjang (3 sampai 5 tahun). Untuk mencapai tujuan, maka setiap periode (bulan/ triwulan/ semester/ tahun atau satuan waktu yang lebih pendek dari tujuan) ditetapkan sasaran-sasaran yang diharapkan dapat mencapai tujuan sesuai dengan indikator kinerja yang diharapkan.

Oleh sebab itu, sasaran seyogyanya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan. Sasaran - sasaran tahunan ini akan dijadikan dasar penyusunan rencana kinerja satuan kerja yang memuat rencana operasional kegiatan sebagai komitmen pimpinan untuk menyediakan sumber daya, proses penganggaran, komitmen kinerja (*performance agreement*), dan pemantauan program / kegiatan

Adapun tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dapat dilihat sebagai berikut :



Tujuan dan Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang

No.	Tujuan	Sasaran	Indika	ator Kinerja
1.	Meningkatkan pelayanan kepada DPRD guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara berdayaguna dan berhasilguna.	 Meningkatnya kapasitas DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. 		apat Komisi yang oleh Sekretariat
				apat Kerja yang oleh Sekretariat
				apat Dengar yang difasilitasi etariat
			Pendapat	apat Dengar Paripurna yang oleh Sekretariat
			Jumlah Rayang difasSekretaria	apat Pimpinan silitasi oleh at
			dan Kons	unjungan Jerja ultasi yang oleh Sekretariat
2.	Meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dalam memfasilitasi peningkatan Kapasitas DPRD	Meningkatnya efektifitas Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan administratif kepada DPRD.	yang ditan	spirasi Masyarakat npung dan n kepada Anggota
			Peraturan	Rancangan I Daerah yang di In untuk dibahas Jiui
				Raperda yang menjadi Perda
				roduk Perda yang an Penerapan Hak ewan



B. PERJANJIAN KINERJA

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2023 telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja

yang memuat program ataupun kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang. Adapun sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 sebagai berikut

Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024

1. Meningkatnya mutu, keterampilan,	1. Perencanaan, penganggaran dan	100%
pengetahuan dan wawasan sumber daya	evaluasi kinerja perangkat daerah	
aparatur dan peralatan kerja serta	Administrasi keuangn perangkat	100%
penyediaan sarana dan prasarana kerja	daerah	
Sekretariat DPRD secara baik dan	3. Administrasi barang milik daerah	100%
berkelanjutan	pada perangkat daerah	
	Administrasi Kepegawaian	100%
	Perangkat Daerah	
	5. Administrasi Umum Perangkat	100%
	Daerah	
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah	100%
	Penunjang Urusan Pemerintah	
	Daerah	
	7. Penyediaan Jasa Penunjang	100%
	Urusan pemerintah Daerah	
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%
	Penunjang Urusan Pemerintah	
	Daerah	
	9. Layanan Keuangan dan	100%
	Kesejahteraan DPRD	
	10. Layanan Administrasi DPRD	100%
2, Meningkatkan kualitas dan kapasitas	Pembentukkan Peraturan Daerah	100%
dalam pelaksanaan tugas fungsi dan	dan Peraturan DPRD	
pokok DPRD : Pengawasan, Legislasi	2 Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%
dan Penganggaran serta	Pengawasan Penyelenggaraan	100%
memaksimalkan penyerapan dan	Pemerintahan	
penghimpunan aspirasi masyarakat	4. Peningkatan Kapasitas DPRD	100%
Kabupaten Bengkayang	5. Penyerapan dan Penghimpunan	100%
	Aspirasi Masyarakat	. 50,5
	6. Pelaksanaan dan Pengawasan	100%
	Kode Etik	
	7. Pembahasan Kerjasama Daerah	100%
	8. Fasilitasi Tugas DPRD	100%

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB 3



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk pertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Tahunan. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam pertantanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan,Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistimatis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang diangap penting dan berpengaruh terhadap pencapai sasaran tujuan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja tahunan. Pengukuran kinerja di dasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam persentase.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Semester I dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan pencapaian indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 dengan realisasi.

Sasaran Strategis 1

. Meningkatnya mutu, keterampilan, pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur dan peralatan kerja serta penyediaan sarana dan prasarana kerja Sekretariat DPRD secara baik dan berkelanjutan

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian
1	keterampilan, pengetahuan dan wawasan	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	98.73%	98.73%
	peralatan kerja serta penyediaan sarana dan prasarana kerja Sekretariat	Administrasi keuangn perangkat daerah	100%	92.67%	92.67%
	DPRD secara baik dan berkelanjutan	3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	99.71 %	99.71 %
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	94.15 %	94.15 %
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	99.98%	99.98%
		6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	98.62%	98.62%
		7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	100%	98.95%	98.95%
		8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	97.55%	97.55%
		9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	99.04%	99.04%
		10. Layanan Administrasi DPRD	100%	96.65%	96.65%



Indikator sasaran Strategis dalam Meningkatnya mutu, keterampilan, pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur dan peralatan kerja serta penyediaan sarana dan prasarana kerja Sekretariat DPRD secara baik dan berkelanjutan yang ditargetkan sebesar 100% terealisasi pada semester 1 sebesar 64.36%.

a. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk memastikan keberhasilan atau mengidentifikasi kegagalan dalam pencapaian pernyataan kinerja suatu program atau kegiatan, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang berperan. Berikut adalah beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang atau mempengaruhi keberhasilan serta kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan:

1. Perencanaan yang Matang:

- o **Program:** Penyusunan rencana strategis yang jelas dan terukur.
- Kegiatan: Penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

2. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas:

- Program: Program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi SDM.
- Kegiatan: Workshop, seminar, dan pelatihan teknis yang relevan.

3. Sistem Monitoring dan Evaluasi:

- Program: Implementasi sistem monitoring dan evaluasi yang efektif.
- Kegiatan: Pengumpulan data secara berkala, analisis kinerja, dan pelaporan hasil.

4. Komunikasi dan Koordinasi:

- Program: Program komunikasi internal dan eksternal yang baik.
- Kegiatan: Rapat koordinasi rutin, pembaruan informasi, dan feedback loop.

5. Sumber Daya yang Memadai:

- Program: Penyediaan anggaran, alat, dan bahan yang cukup.
- o **Kegiatan:** Manajemen logistik dan distribusi sumber daya secara efisien.



6. Keterlibatan Stakeholder:

- o **Program:** Penyertaan stakeholder dalam perencanaan dan pelaksanaan.
- Kegiatan: Forum diskusi, konsultasi publik, dan partisipasi aktif.

Program/Kegiatan yang Menyebabkan Kegagalan:

1. Perencanaan yang Kurang Matang:

- Program: Kurangnya perencanaan strategis atau rencana yang tidak realistis.
- Kegiatan: Penetapan tujuan yang tidak jelas atau tidak dapat dicapai.

2. Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan:

- o **Program:** Tidak adanya pelatihan yang memadai bagi pelaksana.
- Kegiatan: Ketidakmampuan staf untuk menjalankan tugas dengan baik.

3. Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Lemah:

- Program: Sistem monitoring dan evaluasi yang tidak efektif.
- Kegiatan: Kurangnya data yang relevan, evaluasi yang terlambat, atau tidak adanya tindak lanjut.

4. Komunikasi dan Koordinasi yang Buruk:

- Program: Terbatasnya komunikasi antar tim atau dengan stakeholder.
- Kegiatan: Misunderstanding, konflik internal, atau koordinasi yang tidak optimal.

5. Keterbatasan Sumber Daya:

- Program: Alokasi sumber daya yang tidak memadai atau tidak efisien.
- Kegiatan: Kekurangan dana, alat, atau bahan yang diperlukan.

6. Kurangnya Keterlibatan Stakeholder:

- Program: Stakeholder yang tidak terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaan.
- Kegiatan: Resistensi terhadap perubahan atau ketidakpuasan stakeholder.

Untuk memaksimalkan keberhasilan dan meminimalkan risiko kegagalan, penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen proyek yang baik, melibatkan semua pihak terkait, dan melakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan situasi dan kebutuhan.



b. Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dalam Pencapaian Kinerja

1. Penyebab Keberhasilan:

- Perencanaan yang Efektif:
- Penyebab: Rencana yang jelas, detail, dan realistis; penetapan tujuan yang SMART.
- Alternatif Solusi: Terus-menerus meninjau dan memperbarui rencana berdasarkan evaluasi dan umpan balik untuk memastikan relevansi dan efektivitas.
- Sumber Daya yang Memadai:
- o **Penyebab:** Penyediaan anggaran, peralatan, dan bahan yang cukup.
- Alternatif Solusi: Melakukan perencanaan anggaran yang akurat dan memastikan adanya cadangan sumber daya untuk situasi tak terduga.
- · Keterlibatan dan Dukungan Stakeholder:
- Penyebab: Keterlibatan aktif dari semua pihak yang berkepentingan dan dukungan yang kuat.
- Alternatif Solusi: Membangun dan memelihara komunikasi yang efektif serta melibatkan stakeholder sejak tahap perencanaan.
- Pelatihan dan Pengembangan:
- Penyebab: Program pelatihan yang relevan dan efektif untuk meningkatkan keterampilan tim.
- Alternatif Solusi: Menyusun rencana pelatihan berkelanjutan dan menilai kebutuhan pelatihan secara berkala.
- Sistem Monitoring dan Evaluasi:
- Penyebab: Sistem yang kuat untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi hasil.
- Alternatif Solusi: Menerapkan alat dan metodologi monitoring yang tepat dan memastikan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi.

2. Penyebab Kegagalan:



Perencanaan yang Buruk:

- Penyebab: Rencana yang tidak realistis atau tidak lengkap.
- Alternatif Solusi: Melakukan analisis risiko dan merancang rencana kontingensi; melibatkan ahli dalam proses perencanaan.
- Kurangnya Sumber Daya:
- Penyebab: Anggaran yang tidak mencukupi atau peralatan yang tidak memadai.
- Alternatif Solusi: Menyusun anggaran yang lebih akurat, mencari sumber pendanaan tambahan, atau meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
- · Komunikasi yang Tidak Efektif:
- Penyebab: Kurangnya komunikasi atau informasi yang tidak tepat waktu.
- Alternatif Solusi: Menerapkan sistem komunikasi yang lebih baik dan menjadwalkan rapat rutin untuk menjaga informasi tetap up-to-date.
- Kurangnya Keterlibatan Stakeholder:
- Penyebab: Stakeholder tidak dilibatkan atau tidak mendukung inisiatif.
- Alternatif Solusi: Mengidentifikasi dan melibatkan stakeholder kunci lebih awal dan membangun hubungan yang lebih baik dengan mereka.
- Kurangnya Pelatihan dan Dukungan:
- Penyebab: Staf tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan.
- Alternatif Solusi: Menyediakan program pelatihan yang sesuai dan dukungan yang berkelanjutan untuk staf.

Alternatif Solusi untuk Peningkatan atau Penurunan Kinerja:

- 1. Peningkatan Kinerja:
- Evaluasi dan Penyesuaian Strategis:
- Solusi: Melakukan evaluasi berkala terhadap strategi dan menyesuaikan sesuai dengan hasil yang diperoleh dan perubahan lingkungan.
- Optimalisasi Proses dan Sistem:
- Solusi: Mengidentifikasi dan memperbaiki proses yang tidak efisien serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas.
- Peningkatan Motivasi dan Keterlibatan Tim:



- Solusi: Memberikan insentif, umpan balik yang positif, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung.
- Penambahan atau Peningkatan Sumber Daya:
- Solusi: Menyediakan anggaran tambahan, alat, dan bahan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian target.

2. Penurunan Kinerja:

- Analisis Akar Masalah:
- Solusi: Melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi penyebab penurunan kinerja dan mengambil tindakan perbaikan yang sesuai.
- Implementasi Tindakan Korektif:
- Solusi: Menyusun dan menerapkan rencana tindakan korektif berdasarkan temuan analisis untuk mengatasi masalah yang ada.
- Peningkatan Kompetensi Tim:
- Solusi: Mengidentifikasi kekurangan keterampilan dan memberikan pelatihan atau dukungan tambahan untuk meningkatkan kemampuan tim.
- Peningkatan Sistem Monitoring dan Evaluasi:
- Solusi: Memperbaiki sistem monitoring dan evaluasi untuk memberikan umpan balik yang lebih cepat dan lebih akurat.

Dengan merancang dan melaksanakan solusi yang tepat berdasarkan penyebab keberhasilan atau kegagalan, organisasi dapat mengelola kinerja secara lebih efektif dan mencapai hasil yang diinginkan.



Sasaran Strategis 2

Meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam pelaksanaan tugas fungsi dan pokok DPRD : Pengawasan, Legislasi dan Penganggaran serta memaksimalkan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat Kabupaten Bengkayang

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian	
2	kapasitas dalam pelaksanaan tugas fungsi dan pokok DPRD: Pengawasan, Legislasi dan Penganggaran serta memaksimalkan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat Kabupaten Bengkayang	Pembentukkan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	99.05%	99.05%	
		Penganggaran serta memaksimalkan	2 Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	99.79%	99.79%
		3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	99.35%	99.35%	
		Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	99.47%	99.47%	
		5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	92.14%	92.14%	
		6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	100%	96.29%	96.29%	
		7. Pembahasan Kerjasama Daerah	100%	92.85%	92.85%	
		8. Fasilitasi Tugas DPRD	100%	99.80%	99.80%	

Indikator Sasaran Strategis dalam Meningkatkan kualitas dan kapa sitas dalam pelaksanaan tugas fungsi dan pokok DPRD : Pengawasan, Legislasi dan Penganggaran serta memaksimalkan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat Kabupaten Bengkayang secara baik dan berkelanjutan yang ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 33.76%.



a. Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam Meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam pelaksanaan tugas fungsi dan pokok DPRD : Pengawasan, Legislasi dan Penganggaran serta memaksimalkan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

- 1. Koordinasi yang baik antar bagian dan unit kerja lainnya.
- 2. Efisiensi dan efektivitas administrasi DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3. Kerjasama dan dedikasi yang tinggi serta disiplin kerja staf yang baik.

Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

- Hambatan dan Kendala dalam capaian Kinerja adalah sebagai berikut:
 - 1. Ketidak lancaran persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD
 - 2. Ketidak selarasan dan ketidak sesuaian produk hukum
- Solusi dan Pemecahan dalam mengantisipasi dalam hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:
 - Meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyiapan bahan rapat dan risalah, penyelenggaraan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas serta meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan administrasi dankegiatan komisi kepanitiaan dan fraksi.
 - Mengupayakan optimalisasi penyiapan penelitian dan pengawasan terhadap produk hukum.



B. REALISASI ANGGARAN

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.070.850.298`,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.843.817.598,- atau sebesar 92.61 %. Belanja ini diperuntukkan untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan PNS Sekretariat DPRD dan membayar Tambahan Penghasilan PNS serta Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara lansung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, untuk tahun anggaran 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang menganggarkan belanja langsung sebesar Rp. 16.317.081.451,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.050.481.587,- atau 98.37%.

Untuk tahun 2024 Semester 2 pencapaian pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada tabel berikut :

Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Dewan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Semester 2

Berdasarkan Data dari SIMAKDA 2024

No	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	SEKRETARIAT DPRD		34,163,802,010	33,523,514,714	98.13	
1	PROGRAM PENUNJANG			22,431,755,688	21,988,759,749	98.03
	URUSAN	Perencanaan,		45,000,000	44,428,000	98.73
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,500,000	7,500,000	100.00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7,500,000	7,500,000	100.00



Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7,500,000	7,345,000	97.93
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7,500,000	7,375,000	98.33
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7,500,000	7,333,000	97.77
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	7,500,000	7,375,000	98.33
	3,121,578,874	2,892,745,764	92.67
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,076,578,874	2,847,745,764	92.56
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,500,000	7,500,000	100.00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	15,000,000	15,000,000	100.00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7,500,000	7,500,000	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	15,000,000	15,000,000	100.00
	29,999,500	29,911,300	99.71
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7,500,000	7,429,500	99.06
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7,500,000	7,487,300	99.83
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD T,500,000 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD T,500,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 3,121,578,874 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Eopyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah 7,500,000	Penyusunan Dokumen



	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7,499,500	7,496,000	99.95
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7,500,000	7,498,500	99.98
Administrasi		127,031,145	119,595,199	94.15
Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	73,031,145	72,463,700	99.22
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	54,000,000	47,131,499	87.28
Administrasi		1,046,503,940	1,046,262,048	99.98
Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38,000,000	38,000,000	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (SEKRETARIAT DPRD)	100,568,000	100,567,000	100.00
	Penyediaan Bahan/Material	472,858,060	472,796,265	99.99
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	59,566,600	59,564,600	100.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,000,280	14,880,280	99.20
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (SEKRETARIAT DPRD)	47,871,000	47,871,000	100.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (SEKRETARIAT DPRD)	24,065,000	24,038,000	99.89
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249,915,000	249,884,903	99.99
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (SEKRETARIAT DPRD)	3,860,000	3,860,000	100.00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	34,800,000	34,800,000	100.00



Pengadaan Barang Milik		124,279,800	122,570,525	98.62
Daerah Penunjang	Pengadaan Mebel (SEKRETARIAT DPRD)	0	0	
Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya (SEKRETARIAT DPRD)	99,229,800	98,740,525	99.51
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya (SEKRETARIAT DPRD)	25,050,000	23,830,000	95.13
Penyediaan Jasa		995,432,688	984,972,758	98.95
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (SEKRETARIAT DPRD)	5,000,000	5,000,000	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	287,200,000	281,325,118	97.95
	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	0	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (SEKRETARIAT DPRD)	703,232,688	698,647,640	99.35
Pemeliharaan Barang Milik Daerah		763,789,900	745,077,971	97.55
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	373,300,900	363,037,196	97.25
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	201,281,400	200,019,325	99.37





			Pemeliharaan Mebel	0	0	
			Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	80,720,000	75,228,000	93.20
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	49,483,000	49,429,450	99.89
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	0	0	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	59,004,600	57,364,000	97.22
		Layanan		15,367,660,841	15,219,855,284	99.04
		Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	14,775,870,261	14,629,215,529	99.01
			Pelaksanaan Medical Check Up Dprd	403,000,000	402,410,775	99.85
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (SEKRETARIAT DPRD)	188,790,580	188,228,980	99.70
		Layanan		810,479,000	783,340,900	96.65
		Administrasi DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan Dprd	0	0	
			Fasilitasi Fraksi Dprd	0	0	
			Fasilitasi Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dprd	396,319,000	370,196,900	93.41
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (SEKRETARIAT DPRD)	414,160,000	413,144,000	99.75
2	PROGRAM			11,732,046,322	11,534,754,965	98.32
	DUKUNGAN PELAKSANAAN	Pembentukan		2,593,915,500	2,569,390,286	99.05
	TUGAS DAN FUNGSI DPRD	GAS DAN Peraturan	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembahasan Peraturan Daerah	515,185,500	513,356,925	99.65
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (SEKRETARIAT DPRD)	1,256,338,000	1,248,730,003	99.39



	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan (SEKRETARIAT DPRD)	304,482,000	294,066,194	96.58
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik (SEKRETARIAT DPRD)	150,000,000	145,483,000	96.99
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	367,910,000	367,754,164	99.96
Pembahasan		1,832,610,620	1,828,782,498	99.79
Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	131,087,000	130,980,925	99.92
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (SEKRETARIAT DPRD)	179,097,000	177,000,424	98.83
	Pembahasan APBD (SEKRETARIAT DPRD)	505,415,000	505,368,285	99.99
	Pembahasan APBD Perubahan (SEKRETARIAT DPRD)	507,694,920	507,616,372	99.98
	Pembahasan Laporan Semester (SEKRETARIAT DPRD)	115,567,700	114,838,440	99.37
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	393,749,000	392,978,052	99.80
Pengawasan		1,735,694,600	1,724,331,903	99.35
Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (SEKRETARIAT DPRD)	216,448,040	214,440,050	99.07
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (SEKRETARIAT DPRD)	201,402,720	199,962,775	99.29
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (SEKRETARIAT DPRD)	216,448,080	213,284,566	98.54
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (SEKRETARIAT DPRD)	204,594,880	202,517,725	98.98
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (SEKRETARIAT DPRD)	362,624,000	362,605,450	99.99



1	 		I	i
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (SEKRETARIAT DPRD)	50,000,000	48,771,800	97.54
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	223,547,880	222,804,113	99.67
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	260,629,000	259,945,424	99.74
Peningkatan Kapasitas DPRD		2,530,839,402	2,517,513,263	99.47
Rapasilas DFRD	Pendalaman Tugas DPRD (SEKRETARIAT DPRD)	344,905,090	343,761,171	99.67
	Orientasi Dprd	1,574,338,040	1,573,492,274	99.95
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan (SEKRETARIAT DPRD)	316,115,320	312,387,590	98.82
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	219,277,152	214,171,328	97.67
	Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli	0	0	0
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (SEKRETARIAT DPRD)	16,204,000	15,026,000	92.73
	Penyusunan Program Kerja DPRD (SEKRETARIAT DPRD)	59,999,800	58,674,900	97.79
Penyerapan dan Penghimpunan		1,706,656,360	1,572,528,912	92.14
Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja dalam Daerah	460,086,240	434.638.956	94.47
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD (SEKRETARIAT DPRD)	50,000,000	49.299.456	98.60
	Pelaksanaan Reses (SEKRETARIAT DPRD)	1,196,570,120	1.088.590.500	90.98
Pelaksanaan dan Pengawasan		79,999,800	77,032,014	96.29
Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	29,999,960	27,654,550	92.18
	Pengawasan Kode Etik DPRD	49,999,840	49,377,464	98.76
Pembahasan		67,689,960	62,851,350	92.85



Kerja Sama Daerah	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi (SEKRETARIAT DPRD)	67,689,960	62,851,350	92.85
Fasilitasi Tugas DPRD		1,184,640,080	1,182,324,739	99.80
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (SEKRETARIAT DPRD)	950,132,080	949,214,666	99.90
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	174,508,000	173,120,073	99.20
	Fasilitasi Tugas Pimpinan Dprd	60,000,000	59,990,000	99.98

REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 SEMESTER II

NO	KODE REKENING	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA PAGU
1	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.548.015.000	1.525.232.526	22.782.474
2	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	158.090.000	155.689.172	2.400.828
3	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	110.407.000	109.890.000	517.000
4	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	42.090.000	38.982.000	3.108.000
5	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	48.770.000	48.510.000	260.000
6	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	90.719.000	89.800.800	918.200
7	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	58.201.196	16.826.996	41.374.200
8	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	33.000	21.245	11.755
9	510101090001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	111.929.000	87.997.343	23.931.657
10	510101100001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.709.876	3.133.889	575.987
11	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.066.000	9.401.709	664.291
12	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	658.820.226	534.379.384	124.440.842
13	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	230.000.000	223.952.534	6.047.466
		TOTAL	3.070.850.298	2.843.817.598	227.032.700



REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 SEMESTER II

NO	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN	SISA PAGU ANGGARAN
1	510104010001	Belanja Uang Representasi DPRD	667,282,620	667,170,000	112,620
2	510104020001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	74,825,180	64,386,000	10,439,180
3	510104030001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	76,520,180	75,823,748	696,432
4	510104040001	Belanja Uang Paket DPRD	57,606,500	57,259,510	346,990
5	510104050001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	969,528,000	967,396,507	2,131,493
6	510104070001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	86,417,100	64,812,825	21,604,275
7	510104080001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3,778,300,000	3,769,500,000	8,800,000
8	510104090001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630,000,000	630,000,000	0
9	510104100001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	262,451,881	199,151,262	63,300,619
10	510104120001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	59,534,346	56,389,494	3,144,852
11	510104120002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1,398,188	1,378,188	20,000
12	510104120003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4,154,564	4,134,564	20,000
13	510104120004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3,887,528,577	3,877,903,431	9,625,146
14	510104130001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3,759,600,000	3,750,600,000	9,000,000
15	510104140001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	275,923,125	275,310,000	613,125
16	510106010001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	184,800,000	168,000,000	16,800,000
	TC	DTAL	14,775,870,261	14,629,215,529	146,654,732

PENUTUP

BAB

4



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Semester II disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas secara periodik (tahunan) atas mandat yang diberikan sebagaimana tercermin dalam tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 16 tahun 2011 tentang struktur organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang. Selain itu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dikelola dalam bentuk dana, personil, sarana parasarana serta faktorfaktor pendukung lainnya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang telah dapat merealisasikan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Semester II, hal ini dapat dilihat dengan Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang.

Penyusunan LKIP diharapkan menjadi alat umpan balik (feedback) yang dapat digunakan aparatur pemerintah (dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta dapat meningkatkan dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Selama tahun 2024 Semester II Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang melaksanakan 2 (dua) program dan 84 (delapan puluh empat) kegiatan untuk mencapai 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian



besar dapat terpenuhi. Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan telah ditetapkan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan diatas, yang dituangkan dalam APBD setelah perubahan Tahun 2024 sebesar Rp. 34.163.802.010,- (Tiga puluh empat milyar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua ribu sepuluh rupiah). Dari anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 33.523.514.714 (Tiga puluh tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah) atau 98.13%.

Mengingat belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, maka penilaian kinerja masih cenderung pada level indikator output dan outcomes. Capaian sasaran Tahun 2024 Semester II berdasarkan indikator yang ditetapkan sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari 2 (dua) sasaran yang ditetapkan yang meliputi :

Meningkatnya efektifitas Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan administrasi kepada DPRD serta,

Meningkatnya kapasitas DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan dikategorikan **Berhasil.**

Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja tersebut diatas tidak terlepas dari dukungan, kerjasama dan partisipasi semua pihak. Upaya - upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang dalam rangka memberikan pelayanan kepada DPRD dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Namun demikian, pencapaian tersebut diatas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan maupun dalam pelayanan kepada DPRD, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain:

1. Tingkat perencanaan yang masih kurang optimal.



- 2. Masih belum optimalnya kualitas sumberdaya manusia untuk melaksanakan program maupun kegiatan serta kegiatan rutin.
- Masih dirasakan adanya perbedaan persepsi antara kepala SKPD dengan DPRD Kabupaten Bengkayang terutama menyangkut tertib dalam pengelolaan keuangan.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Sekretariat DPRD akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- Terus melakukan pembinaan kepada pegawai sesuai formasi berdasarkan struktur organisasi yang ada dan berusaha menempatkan staf yang ada untuk mengisi bagian-bagian yang dipandang sesuai dengan kemampuan dan keahlian pegawai.
- Memberikan arahan serta bimbingan kepada pegawai serta mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihanpelatihan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta ketersediaan dana yang dianggarkan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- 3. Mengadakan rapat atau pertemuan yang menjadi peran penting yaitu pola komunikasi dalam menjalin relasi antara kepala SKPD dan DPRD tidak hanya berupa pola komunikasi formal tetapi juga penting untuk adanya komunikasi non formal yang dijalin oleh kepala SKPD dan DPRD.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang akan berusaha akan berusaha bekerja secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada baik dengan jumlah pegawai yang ada maupun tingkat sarana dan prasarana yang dimiliki, sehingga visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dapat tercapai.



Demikian yang dapat kami laporkan, untuk dapat dijadikan bahan kebijakan lebih lanjut.

Bengkayang, Januari 2025

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bengkayang,

BERNADETA, SH., MH

Pembina Utama Muda / IV.c NIP. 19710416 200003 2 005